



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **11:15** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Ir. Heri Purwanto, Bambang Barata Aji, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **13:03** WIB.

**Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Ir. Heri Purwanto, Bambang Barata Aji
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
No APPP : 143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Permohonan bertanggal 30 Oktober 2023	8 rangkap	Mohon menyerahkan berkas Surat Kuasa, Daftar Alat Bukti, dan Bukti Fisik
7	Permohonan bertanggal 30 Oktober 2023	9 rangkap	1 asli, 8 copy.
8	Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-3	9 rangkap	1 asli, 8 copy.
9	Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2023 dan salinan KTP, kartu advokat dan BAS kuasa hukum	9 rangkap	1 asli, 8 copy.
10	Bukti fisik P-1 s.d. P-3	1 rangkap	Asli.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.